

BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan purbakala (heritage), maupun seni dan budaya (living culture) yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat, merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban:
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah (laut, daratan dan pegunungan) Kabupaten Pesisir Barat diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419):
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285);

 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029:
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

- 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- 7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
- 9. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 10. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 11. Objek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- 12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
- 13. Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
- 14. Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah Rencana Operasional pengembangan objek wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berazaskan:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
- c. Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- d. Berkelanjutan, yaitu upaya menegakkan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai;
- e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Tujuan dari RIPPDA adalah:

- Secara umum, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pelayanannya;
- b. Secara khusus, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa bangga terhadap daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

RIPPDA mempunyai sasaran sebagai berikut:

a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;

- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata daerah:
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata daerah;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata daerah.

BAB III Fungsi, kedudukan, dan jangka waktu Pasal 5

RIPPDA mempunyai fungsi:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;

c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;

d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

RIPPDA merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) RIPPDA berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pasal 8

Garis-garis kebijaksanaan umum pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;

- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan aslidaerah;
- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Garis-garis strategi pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pesisir Barat terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globasisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Pesisir Barat yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktikkan dan dipelihara;

d. Meningkatakan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap

norma dan nilai-nilai yang berlaku;

e. Menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;

f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya

pariwisata.

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN Pasal 10

Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata;
- b. Penetapan zona pengembangan pariwisata;
- c. Pengembangan usaha pariwisata;
- d. Pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pengembangan kelembagaan;
- f. Pengembangan fasilitas penunjang;
- g. Pengelolaan lingkungan;
- h. Pengembangan pasar pariwisata.

Bagian Pertama Penetapan Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 11

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata daerah dibagi dalam 3 (tiga) kawasan peruntukan;
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dikembangkan pada daerah yang memiliki objek wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dikembangkan pada daerah yang memiliki objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan; dikembangkan pada daerah yang memiliki objek wisata buatan di Kabupaten Pesisir Barat;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c pemanfaatannya dapat dilakukan melalui pengembangan zona pariwisata.

Bagian Kedua Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata Pasal 12

- (1) Zona pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam 4 (empat) zona pengembangan;
- (2) Zona pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Zona 1 Kawasan Tanjung Setia
 - b. Zona 2 Kawasan Bengkunat Belimbing dan Pulau Betuah
 - c. Zona 3 Kawasan Lemong dan Pulau Pisang
 - d. Zona 4 Kawasan Labuhan Jukung dan Krui Selatan
- (3) Konsep Zona Wisata Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1) Bagi setiap zona pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat disusun Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi setiap ODTW di zona pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat disusun rencana detail dan teknis objek wisata dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kawasan pariwisata serta ODTW yang berada di wilayah perbatasan antar daerah diatur secara bersama-sama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Usaha Pariwisata Pasal 15

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan ODTW;
- c. Usaha sarana pariwisata.

Paragraf 1 Usaha Jasa Pariwisata Pasal 16

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
 - a. Jasa biro perjalanan wisata;
 - b. Jasa impresariat;
 - c. Jasa informasi pariwisata;
 - d. Jasa konsultan pariwisata.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa impresarian merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresarian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

- (1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultansi tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultansi kepariwisataan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Paragraf Kedua Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Pasal 21

- (1) Pengusahaan ODTW meliputi kegiatan membangun dan mengelola ODTW beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola ODTW yang telah ada.
- (2) Pengusahaan ODTW dapat dikelompokkan ke dalam:
 - a. Pengusahaan ODTW alam;
 - b. Pengusahaan ODTW budaya;
 - c. Pengusahaan ODTW minat khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan ODTW yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 22

Pengusahaan ODTW alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 23

Pengusahaan ODTW budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 24

Pengusahaan ODTW minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga Usaha Sarana Pariwisata Pasal 25

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
 - a. Penyediaan akomodasi;
 - b. Penyediaan makan dan minum;
 - c. Penyediaan angkutan wisata;
 - d. Penyediaan sarana wisata tirta.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaandan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Pasal 30

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

Pasal 31

- (1) Pengembangan jalur perjalanan wisata diperlukan dengan maksud untuk meningkatkan kemudahan pencapaian ke objek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalurjalur wisata baru.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Pasal 32

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta.

Bagian Kelima Kelembagaan Pasal 33

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata dacrah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta masyarakat, dan/atau perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

(1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas.

(2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berbentuk:

a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan

pariwisata.

Bagian Keenam Fasilitas Penunjang Pasal 35

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta money changer.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Lingkungan Pasal 36

(1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pengembangan Pasar Pariwisata Pasal 37

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait

Pasal 38

Pengembangan pasar pariwisata meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern;
- b. Peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- c. Tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta.

Pasal 39

Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan/atau badan hukum.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN Pagal 40

(1) Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

(2) Program pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan dalam arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 41, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 42, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan/atau instansi terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui, pada tanggal 21 Juni 2017 BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui, pada tanggal 21 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

AZHARI

, , , ,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 02/464/PSB/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAWARDI, S.H.

NIP. 19640630 199003 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : TANGGAL : 2

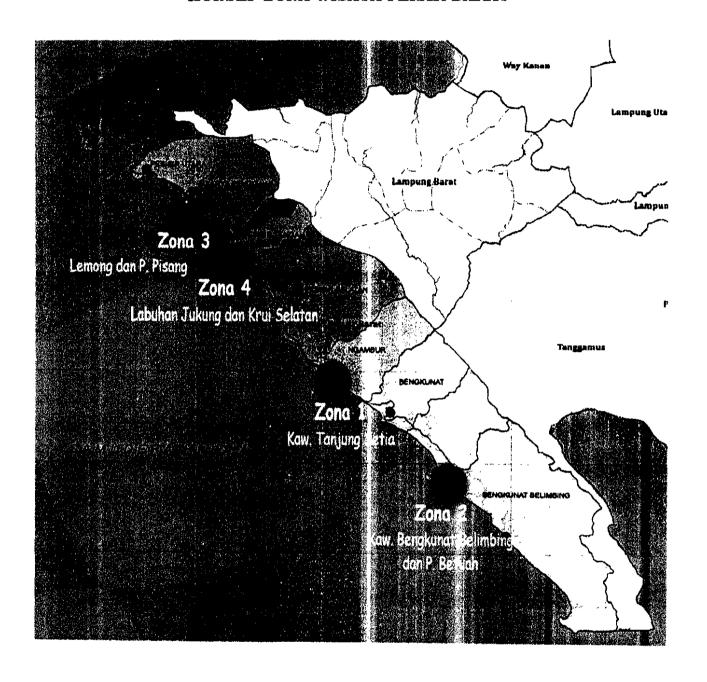
03 TAHUN 2017

JUM 2017

TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT

KONSEP ZONA WISATA PEISIR BARAT



BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 03 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 JUN: 2017

TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT

ARAH KEBIJAKAN PENCEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

1 DESTINASI PARIWISATA

1,1 PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Ferencaman pembangunan Wilayah Pembangunan Pariwata dan Destinasi Pariwiasta

							PELAKS	ANAA	N _					Sumb	er dans	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	i				Tahap I	1		APBN	APBD	APBD	Swada
	<u></u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AFDIT	Prop	Zah,	31111
A	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN DAERAH			-	-		 -	_	<u> </u>		<u> </u>					
	= = =	Diparda, Rappeda													0	
	Przyusuman Masterplan Zona Wisate Fengkunat Belimbing dan Pulau Bertnah	Diparda, Bappeda													٥	
		Diparda, Bappeda													٥	
	 Penyusuman Zona Wisata Labuhan Jukung dan Krui Selatan 	Diperda, Bappeda		2012 - EN											o	
В	regulasi tata bangunan dan tata lingkungan							_		-	-					
	Penyusuman Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Destinasi Pariwisata	Diparda, PU, Bappeda			•								ō	0	٥	
		_		Ī		1 —	Ī	1	1	_					l	l

Arah Kebijakan 2: Penegakan Legulari Pembanganan Zona Wiasia dan Destinasi Pariwissia Daerah

						PELAKS	ANAA	4					Szemi	مسله ي	
O URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Taken	ī				l'ahap l	<u> </u>		a louissur	APBD	APED	Swasta
<u> </u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2024	2025	APBN	Prop	Kab.	
MONITORING DAN PENGAWASAN OLEH PEMER DAERAH TERHADAP PENERAPAN BENCANA INIX							L								
Monitoring dan Evaluei Priakumaan Master Plan	******	1						. \						٥	
Penyiapan rancangan peraturan tentang tala bar dan lingkungan														0	
Penetupan Perda Rencara Induk Pembar Pariwisata Daerah														٥	
Penetapan Regulasi tentang Indikasi Pi Pembangunan Pariwinta Daerah	Ograma Diparda, Bappeda													٥	
Persetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan da Lingkungan	n Tata Diparda, PU Bappeda						1 5 2 S	Ç.				O	0	٥	

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Zona Wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah

							PELAKS	ANAAI	N					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Takap	I			•	lahap i	1		APBN	APBD	APBD	Swasta
<u> </u>		=	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	APDN	Prop	Kab.	OWARIA
	koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku Usaha, dan masyarakat															
	 Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah 	Diparda, Bappeda													Ŏ	
_	Pembentukan Forum Kordinasi Teknis Kepariwisataan	Diparda, Bappeda													Ö	
			1 —	\sqcap												

1,2 PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Zona Wisata dan Destinasi Wisata

Г			${f \top}$	_	_	1	PELAKS	SANAA	N					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	<u> </u>			•	l'ahap l	1		APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ardin	Prop	Kab.	- Swasta
Ā	PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BARU		\vdash		\vdash						_					
]	 Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata 															
	alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (mass market) maupun bagi segmen ceruk pasar (niche market) di kawasan yang belum berkembang	Diparda, Bappeda		4 ° 5 m									ð	ō	O	
	 Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang 	Diparda, Bappeda											Ö	O	Ö	-
	 Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemetiharan destinasi untuk mewujudkan community based tourism di kawasan yang belum berkembang 	Diparda, Bappeda											٥	ō	ō	
	 Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda											ō	Ö	Ö	
				_					1							

Arah Kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

			1			1	PLAKS	ANAA)	1					Sumbe	r dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	Ī				(ahap i	0		APEN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ALDA	Prop	Kab.	0000
	PENGEMBANGAN INOVASI MANAJEMEN PRODUK DAN KAPASITAS DAYA TARIK WISATA UNTUK MENDORONG AKSELPRASI PERKEMBANGAN WPP															
	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif seria daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berbembang	Diparda,													Ŏ	
	 Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional maupun nasional 		·												Ŏ	
	 Feningkatan kualitus dan kapasitus sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitus kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata 	Diparda, Bappeda													Ŏ	
														1		

Arah Kebijakan 5: Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih has

							TELAKS	YNYY	Ŋ					Sumbe	r dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap .	i			7	Sahap :	II		APBN	APBD	APBD	Swaste
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	APDN	Prop	Kab.	377,555
	PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI ATAU KERAGAMAN DAYA TARIK WISATA															
	Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai akala (hard - soft attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan bustan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar (niche market).	Diparda													0	
	 Pengembangan jenis-jenis atrakai lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang aaling melengkapi 	D: -4.													٥	

Arah Kebijakan 4: Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing Zona Wisata

		_				1	PELAKS	ANAA	V.				_	Sumbe	r dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA		•	Tahap	Ī			7	ahap l	<u> </u>		APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	APDN	Prop	Kab.	SWESTE
A	PENGEMBANGAN ZONA WISATA TANJUNG SETIA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI															
	 Penyusunan Site Plan Kawasan Tanjung Setia dengan konsep Natural 	Diparda													Ö	
	 Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi pariwisata) 	Diparda, PU, BPFBD											ø	O	Ö	٥
	 Pengembangan prasarana pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi) 	PU											0	٥	Ö	0
B	PENGEMBANGAN ZONA WISATA BENGKUNAT BELIMBING DAN PULAU BERTUAH															
	 Penyusunan Site Plan Kawasan sesuai dengan hasil masterplan zona wisata 	Diparda													Ö	
	 Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi paniwisata) 	Diparda, PU, BPPBD		مداد بالمائم و							eculosa voc	ANGEN SEN	O	Ö	Ö	Ö
	 Pengembangan prasarana pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi) 	PU											Ŏ	Ò	Ö	Ö
С	PENGEMBANGAN ZONA WISATA LEMONG DAN PULAU PISANG												 	i 	<u> </u> 	
	 Penyusunan Site Plan Kawacan sesuai dengan hasil masterplan zona wisata 	Diparda	1 20 4				٠.		e						Ö	
	 Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi pariwisata) 	Diparda, PU, BPFBD											٥	٥	O	Ö
	 Pengembangan prasamaa pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi) 	PU											O	Ö	٥	٥
С	PENGEMBANGAN ZONA WISATA LABUHAN JUKUNG DAN KRUI SELATAN															
	 Penyusunan Site Plan Kawasan sesuai dengan hasil masterplan zona wisata 	Diparda													0	
	 Pengembangan sarana pendukung wisata (kesehatan, pemadam kebakaran, pusat informasi pariwisata) 	Diparda, PU, BPPBD											Ö	Ö	O	Ö
	 Pengembangan prasarana pendukung pariwisata (infrastruktur jalan, air, listrik, drainase, sanitasi) 	PU											Ö	٥	0	٥
						1		1								

1,3 PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata

$\overline{}$							PELAKS	ANĀĀI	1					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap					ahap l			APBN	APBD	APBD	Swasta
ı			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Al DIV	Prop	Kab.	
																l
A	MENINGKATKAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERINTISAN KAWASAN PARIWISATA] 											
	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	Diparda, Bappeda													Ŏ	
	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata	Diparda, Bappeda													ð	
	 Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata 	Diparda, Bappeda	elegelisedo inte		i province isl	San	o na min inference	. Essenio per	ود بدع داده م	نين - ياستو	والعراق المتعالمة أأ	on stage with the			O	
ļi.	MENGEMBANGKAN PRASARANA/ INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MENDUKUNG KESIAPAN KAWASAN PARIWISATA SEBAGAI DESTINASI WISATA BARU/ RINTISAN DAN/ ATAU KAWASAN PARIWISATA YANG AKAN DIKEMBANGKAN															
	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata	Diparda, Bappeda												<u> </u>	Ŏ	
	 Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda													Ŏ	<u> </u>
	 Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda													O	<u> </u>
	 Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda													0	
	 Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda			,										0	<u> </u>
1			i	ì	!	1	1	1	1	I	l	1		1	I	l

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing Wisata

	<u> </u>						PELAKS	ANAA	N					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	I				Shap i	Ī		APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AIBN	Prop	Kab.	GHZGZ
Α	PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN BERBAGAI SKEMA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)															
	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata	Diparda,													ŏ	
	 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemiteraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata 	Diparda,	- 1720 -							и д. (€.					Ŏ	
В	PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN BERBAGAI SKEMA KEMANDIRIAN PENGELOLAAN															
	 Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 	Diparda, Bappeda		•											Ŏ	
	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang	Diparda, Bappeda													o	
				1										 		

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

		•]	PELAKS	ANAAI	V						Sumber da	na
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA		-	Tahap !	<u>-</u>			7	Tahap I	1		APBN	APBD	APBD	Swasia
			2016				2020	2021	2022	2023	2024	2025	APBN	Prop	Kab.	
														•		
A	PENYUSUNAN REGULASI PERIJINAN UNTUK MENJAGA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN				ſ											
	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung	Diparda, Bappeda													ō	
	 Kordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda													ð	
B	MENDORONG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN															
	 Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda													Ö	
	 Meningkatkan pengawasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan 	Diparda, Bappeda													Ö	_
	 Peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata 	Diparda, Bappeda													٥	0

1,4 AKSESIBILITAS DAN/ ATAU TRANSPORTASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Pengembangan Moda Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

							PELAKS	ANAAI	V					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap					lahap l			APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ALI DIV	Prop	Kab.	
														<u> </u>		
٨	MENGEMBANGKAN SARANA MODA TRANSPORTASI DARAT, IAUT, ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DAN TRANSPORTASI YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR WPP]									
	Pengembangan angkutan wisata darat yang memenuhi standar kemanan dan kenyaman bagi wisatawan	Diparda, Ferhubungan													0	
	 Mengembangkan moda transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan 	Diparda, Perhubungan													0	
	Pengembangan angkutan wisata laut antar WPP yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan	Diparda, Perhubungan									4 SELECT SELECT	d adams of comme			0	
	Pengembangan kerjasama dengan perusahsan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka mendukung akesibilitas antar zona wisata	Diparda, Perhubungan	Charles to												0	
	 Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi wisatawan 	Diparda, Perhubungan													ō	
	 Femyusunan studi kebutuhan moda transportasi antar zona wisata 	Diparda, Perhubungan													0	

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

							PELAKS	ANAAI	1					Sumb	er dana	_
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	I			٦	ahap l	1		APBN	APBD	APBD	Swasta
		_	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AFDN	Prop	Kab.	
A 	MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN ASDP YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR ZONA WISATA							_								
	 Pembangunan shelter bis pariwisata di tiap-tiap kawasan wisata 	Perhubungan													Ö	
	Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum	Perhubungan													0_	
	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	PU													Ö	
	Peningkatan kualitas dan kuantitas tourism signage	Diparda, Perhubungan											:		O	
,	 Penyusunan studi kebutuhan pengembangan prasarana transportasi dimasing-masing koridor pariwisata daerah 	Diperde, Perhubungan		. dec 3-12-4.											Ö	
	 Penambahan Armada Transportasi Bus Pariwisata untuk jalur- jalur tertentu 	Diparda, Perhubungan													Ö	Ŏ
	Pembangunan dermaga/ pelabuhan/ marina untuk pengembangan wisata bahari (cruise dan sailing)	Diparda, Perhubungan													Ö	
	 Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan wisata bahari (diving, snorkling, fishing) 	Diparda, Perhubungan													Ö	Ŏ
	 Penyedian kapal-kapal wisata untuk mendukung pengembangan wisata bahari dan eco-tourism (island tour) 	Diparda, Perhubungan													Ö	Ŏ
			l]	1	1	1			ļ	

Arah Kebijakan 3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

						1	ELAKS	ANAA	N					Sumb	er dama	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA		_ •	Tahap !				1	ahap i	lī		APBN	APBD	APBD	Swaste
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ALDIA	Prop	Rab.	о ж дана
A			1					l				1 1		1		
	MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN ASDP YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR ZONA WISATA															
	Penerapan manajemen kelalufintasan dalam pengaturan jalur lalu fintas darat, laut, dan ASDF	Perhubungan											Ö	0	Ö	
	 Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat, laut, dan ASDP 	Perhubungan											Ö	0	Ö	
	 Peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi 	Perimbungan											o	o	٥	
	Peningkatan jam operasi angkutan umum	Perhubungan											Ö	0	Ō	
	 Merringkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata 	Perhubungan											O	0	٥	
	Meningkatkan sistem pelayanan keamanan laut	Perhubungan											Ö	O	Ö	

I,5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan

]	PELAKS	ANAA	Ŋ					Sumb	er dana	
NO	uraian Peogram	PELAKSANA			Tahap	1			1	ahap l	1		APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2024	2025	Arbn	Prop	Kab.	SW ASIA
			1													
A	PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN															
	Perungkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	Diparda													O	
	 Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan 	nsitas keteribatan lembaga masyarakat dalam									Ö					
В																
	PENGEMBANGAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM POLA		1	Į į		l		l	ll		Į	Į Į		ļ	Į I	Į
	DMO (DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION)		1			ł	1					ı				
	DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN		<u> </u>													
	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Diparda												•	٥	
	 Perintiaan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan 	Diparda													٥	
	Pelatihan dan Pendidikan tentang DMO	Diparda													0	

1,6 INVESTASI PAZIWISATA Arab Kebijiskan 1: Mendorong bendala dan berkembangnya investasi dibidang Pariwisata

}	CISLA	2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Arbin Prop Kab.		M PERFAKKAN MANATATA		e waktu terkentu Soktor Pajak	ani menyebahkan Sektor Pajak
NIA.				ANAM PERMAKAN		periode walrta tertenta Selstor Pajak	
	URAIAN PROGRAM			AEDINGKATKAN PERBAIKAN JASA PELAYANAN	DAN MODAL ASTNG DI SERTOR PARIWISATA	Penetapan Keringanan Pajak dalam periode bagi Pengembangan lavedasi	Memuruhkan harif pajak daerah yang berpotensi menyebahkan kenankan hanga/jasa
	£		4		_		

Arah Kebijakan L. Peningbertan Kemadahan Investoni di Bidang Pariwisata

1				ł	ì		PELAKSANAAN	3	l	l	l	L		Sumber dans	
Ş	UKAIAN PROGRAM	PELAESANA			I quada?				F	II day		į	7	APBD	4
			2016	2017	8100	6102	1202 0202 6102	21 2	22 2	223 20	24 202	NGJW [Prop	Teb.	- No.
◀	A MENCEMBANCEAN DERECULASI PERATURAN YANG						-	 	 	╫-					
	MENCHAMBAT PERZINAN					-			_		_		_		
	 Penyesusian atau kemudahan urusan kontrak tenasa kerja 	Diperda						-	-					0	
	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Dipenda	,				1		<u> </u>			_	ļ	0	
	1								H						

Arah Kebijahan 3: Peningkatan Promosi Investari Di Bidang Pariwisata

1			L	l	l		PELAKSANAAN	MAAN				-		Stearby	Samber dana	
ş	URAIAN PROCRAM	PELAKSANA		T	Tahap I		ļ		Ę.	Tahap II			-	APBD	APBD	1
			2016	2017	2018	2018 2019 2020		1202	220	2022 2023 2024	2024 2	202	VE DV	Prop	1	
¥	MENCEMBANGLAN SISTIM PROPIMASI INVESTASI DI BIDIANE PARTUREATA							-		-		-	1			
Ţ	- Fenyedinan informass profil prestant daemh	Diparda						- ,			1		1	1	0	
مما	ARENGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI DALAM NEGER DAN DI LUAR NEGER												<u> </u>			
1	 Penchayan pemberian kemelahan bagi inwebasi sekor pariwinda yang mendawan peningkaban kunjangan wisatawan dan lama tinggal 	Dipards													0	
l	- Pergernbengan selectarist benama promosi irrestasi	Diperda													O	\
I	- Pengembangan berbagai marketing kit imrestasi	Diperds													0	
	 promoti investasi seklor pariwisata melahi meda cetak, elektronik, dan internet 	Diparda													Q	
	- Penyrdiaan informati mengenai perizinan yang diperlukan	Diperde										[[-		0	
	C IAGENDAGRATEAN SINTERCH PROMOSH PENANAMAN MODAL DE BIDANG PARIWISATA DENGAN SEKTOR TEEKAT															
	 Peningkatan kerjasama lietas sektor tertasi promosi investasi 	Diparda dan Sektor terkai										_			0	
ı					ľ				ŀ		l					

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan

						1	PELAKS	ANAAI	1 _					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap					Tahap i	1		APBN	APBD	APSD	Swasta
	<u> </u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	M DAY	Prop	Kab	
A	PENINGKATAN KAPASITAS/SKILL SEKTA PRODUK LAYANAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DI BIDANG PARIWISATA			=												
	 Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan tasaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata 	Diperda, Koperasi UMKM													Ō	
	 Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata 	Diparda, Koperan UMKM													٥	
	 Fasihissi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata 	Diparda, Koperasi UMKM													٥	
	Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi	Diparde, Koperasi UMKM													٥	
В	PENGEMBANGAN REGULASI YANG BERORIENTASI UNTUK MENDORONG				Ţ									<u> </u>		
	 Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat 	Diparda													٥	
	 Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program corporate social respondibiliy (CSR) 														0	

Arah Kebijakan S: Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat

						PELAKS	ANAA)	N _					Sumb	et qena	
URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	<u> </u>				l'abap l	I		A DRING	APBID	APBD	Swarts
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AIDN	Prop	Kab.	
meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air															
Mengembangkan kegistan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah	Pendidikan													٥	
Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah	Pendidikan											_		0	
 Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya 	Pendidikun													0	
MENINGKATEAN FEMAHAMAN, DUKUNGAN IIAN PAETISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAFTA FESONA BAGI TERCIPTANTA IKLIM KONDUSIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT															
Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal	Diperda													O	
 Pengembangan media campaigu pada media massa lokal (ortak) dan elektronik tentang sadar wisata 	Diparda											_		0	
Pembinaan dan penataan kuwasan wisata dan komunitus masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona	Diparda													٥	
Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata	Diparda													0	
Pernberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan manyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata	Diperde													٥	
	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegistan study tour pariwisatu di kalangan unia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja unia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATEAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN HAN PARTESIPASI MASYARAKAT DAJAM MEWURUPKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANYA IKLIM KONDASIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaigu pada media massa lokal (oetak) dan clektronik tentang sadar wisata Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan priasip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegistan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah Pendidikan Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Pendidikan Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATEAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN HAN PARTESIPASI MASYARAKAT DAJAM MEWURUDKAN SAPTA PISONA BAGI TERCIPTANTA IKLIM KONDASSP EPPARIWISATAAN SETEMPAT Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaign pada media massa lokal (cetak) dan clektronik tentang sadar wisata Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan priasip-priasip sadar wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTALTANAH AIR Mengembangkan kegistan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikutum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTESIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJURKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANYA UKLIM KONDASSP KEPARIWISATAN SETEMPAT Pengembangan media campajan pada media musua kokal (oetak) dan Diparda Pengembangan media campajan pada media musua kokal (oetak) dan Diparda Pengembangan media campajan pada media musua kokal (oetak) dan Diparda Pengembangan pendaan kuwasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok madar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTALTANAH AIR Mengembangkan kegistan study tour pariwisata di kalangan unia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTESIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUNKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANYA UKLIM KONDASSP KEPARIWISATAN SETEMPAT Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campajan pada media musua kokal (ortak) dan Diparda Pengembangan media campaja pada media musua kokal (ortak) dan Diparda Pembinaan dan penataan kuwasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminikan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegiatan atudy tour pariwisata di kalangan unia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTSHPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUNKAN SAFTA RESONA BAGI TERCIPTANTA UKUM KONDASIP KEPARIWESATAAN SETEMPAT Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaigu pada media massa kokal (oetak) dan clektronik tentang sadar wisata pada media massa kokal (oetak) dan clektronik tentang sadar wisata bada komunitas masyarakat yang mencerminkan priasap-prinsip sadar wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok sadar wisata dan kembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegiatan atudy tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTSIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUNKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANTA UKUM KONDASIP KEPARIWISATAAN SETEMPAT Pengembangan media campaiga pada masyarakat lokal Pengembangan media campaiga pada media massa kokal (oetak) dan clektronik tentang sadar wisata pada mendia massa kokal (oetak) dan pendianan dan penadam kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan priasap-prinsip sadar wisata/ sapta pesoma Revitalisasi kelompok sadar wisata dan kembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka Timenda	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegistan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minal baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTERPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAFTA FESONA BAGI TERCIPTANYA IKLIM KONDASE EPARIWISATAAN SETEMPAT Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaign pada media massa lokal (cetak) dan clektronit tentang sadar wisata Pembinaan dan penataan krasasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok sadar wisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka Diparda	URAIAN PROGRAM PILAKSANA Tahap I 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MENINGKATKAN MC/ITVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AUR Mengembangkan kegiatan study tour pariwisata di kalangan unia sekolah Mengembangkan kurikuhun lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATEAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN HAN PARTESIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PISONA BAGJ TERCIPTANYA KLIM KONDASSP EPARTWISATAAN SETEMPAT Pengembangan media campaiga pada media massa lokal (octak) dan clektronik tentang sadar wisata pada media massa lokal (octak) dan clektronik tentang sadar wisata Pernbinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prasayan wisata/ sapta pesona Revitalisasi kelompok madar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	MENINGKATKAN MOTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegiatan study tour pariwisata di kalangan unia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minal baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, semi dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTESPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAFTA FESONA BAGJ TERCIPTANYA UKIM KONDASSP REPARTWISATAAN SETEMPAT Pengembangan media campaiga pada masyarakat lokal Pengembangan media campaiga pada media massa kokal (cetak) dan clektronik tentang sadar wisata Pernbinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata Revitalisasi kelompok madar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pernberian baratuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	URAIAN PROGRAM PTIAKSANA Tahap 1 Tahap 1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MENINGKATKAN MOTIVASI, ESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegistan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikuhum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, semi dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTESIPASI MASYARAKAT DAJAM MEWUJUDKAN SAPIA PESONA BAGI TERCIPTANYA UKLIM KONDASSP EPAREWISATAAN SETEMPAT Pensingkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaign pada media massa lokal (oetak) dan clektronik tentang sadar wisata Pensingkatan sosialisasi sadar wisata dan komunitus masyarakat yang menceruninkan prisuip-prinsip sadar wisata dan komunitus masyarakat yang menceruninkan prisuip-prinsip sadar wisata dan kembaga masyarakat untuk pengembangan parwisata Revitalisasi kelompok madar wisata dan lembaga masyarakat untuk pengembangan parwisata Permberian bartuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	Tahap II Tahap II 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MENINGKATKAN MCTIVASI, ESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegistan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTERPASI MASYARAKAT DAJAM MEWUJUDKAN SATTA RESONA BAGI TERCIPTANYA UKUM KONDASIP EPPARIWISATAAN SETEMPAT Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaign pada masyarakat lokal Pengembangan media campaign pada media massa kokal (oetak) dan clektronik tentang sadar wisata Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang nencerminkan prisusip-prinsip sadar wisata dan komunitas masyarakat untuk nendukung pengembangan pariwisata Pemberian bartuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap I Tahap II 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 MENINGKATKAN MCTIVASI, KESEMPATAN, DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR Mengembangkan kegiatan atudy tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah, seni dan budaya MENINGKATKAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN HAN PARTSHPASI MASYARAKAT DAJAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANTA BELIM KONDASSP KEPARIWISATAAN SETEMPAT Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Pengembangan media campaigan pada masyarakat lokal Pengembangan media campaigan pada media massa lokal (cetab) dan cickhronik tentang sadar wisata Pembinaan dan penalam krwasan wisata dan komunitas masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata Pemberian bartuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka	URAIAN PROGRAM PELAKSANA Tahap I Tahap II Tahap II	Tahap I Tahap II Taha	Tahap I Tahap II Tahap II AFBD AFBD Frop IIab. MENINGKATKAN MOTIVASI, ESEMPATAN, DAN EMAMPUAN MASYARAKAT DAJAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AUR Mengembangkan kegiatan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah Mengembangkan minal baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, ami dan budaya Menjembangkan DAN PARTSHPASI MASYARAKAT DAJAM MENUHUNGAN DAN PARTSHPASI MASYARAKAT Pendidikun Pendidikun Diparda Pengembangan nuclis campaign pada media massa lokal (octak) dan ciektronik tentang sadar wisata pada masyarakat lokal Pendidikun Diparda Diparda Diparda Diparda Pendidikun pengembangan pariwip-prinsip sadar wisata/ septa pesona Revitalisasi kelompok madar wisata/ septa pesona Revitalisasi kelompok madar wisata/ septa pesona Revitalisasi kelompok madar wisata/ septa pesona Diparda

2 PEMASARAN PARIWISATA 2,1 PASAR WISATAWAN Arah Eddigizan 1: Pemantapan Sepsen Pasar Wisaiswan Massal (Mass Market) dan Pengembangan Destinan Pariwisata dan Dimanika Pasar Gebal

L			STARS	PELAESANAAN				Sumber dans	dena	
ş	MACCOUNT TRAINING	DEL A PEA NA	Teles I		Tahan II		-	APPRIL	CHAY	
}		S. Carrier	2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	202 202	2 2023 202	4 2025	APBN	Prop	3	Swarts
٧	MENDAGKATKAN PEMASALAN DAN PROMOSI UNTUK MENDUKUNG PENCIFTAAN DESTINASI PAKWISATA YANG DIPEGETASKAN									
		Diparda							0	
m	MENGEMBANGKAN PROMOSI BERBASIK TEMA TERTENTU						+	1		
	Program penastaran dan promosi berbasis seasa tertema melahni cumanniny marketing dan kampanye penastaran secara tertemas dan terpada dengan pengembangan produk sepata tema.	Diparda							0	1
	Program permaneran den promosi bertema khasas metak mendelangkan wisatawan massal	Dipards							٥	
		Dipards							0	
v	AESELERASI PERGERAKAN WISATAWAN					_				
	 Penciptaen program penasaran dan promosi produk terpadu meliputi penciptaen skema alema promosi allang di sepanjang mata rantai industri periwisata dan pang terlari 	Díparda							0	
	Intramificasi program promosi den penasaran berhasis komumitas (community marketing), melaluri: A Promosi wisata pada meda khurus tomumitas tertentulbiling, majalah hebi, haletin erganisasi, dlb. Penadasian pertemasal event komumias tertentu schagai meda promosi (pertemum behangal, komumitas bebi, dlb.)	Diparda	Andrews Control of the control of th						0	
	Intentifikasi pemaseran pada aegmen remaja dalam rengka merungkufun nasa cinta banah ati, melabai: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan tetolah, penyuran inggi, lembaga bimbingan belajar, dil) b. Pengembargan inventif dan kenjasama sastar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan	Diparda							0	
	Pening Letten kenndehm abes den akras pembiayan perjalanan wash, sedaki. a. Pokungan hanga tertasan (sirenis discount) b. Kenntungan gamba situ jasa tertentu (double bez.eft) c. Karta kennggotaan (traveler/expatriate card) d. One entry ticket yang berlaku untuk beberapa obyek wisata	Diperda							0	
	intensifikasi pemasaran paket wisah dan event temah tertem (nafai kelokulan, ertigions, weekenders, dan sebagainya, seperti paket wisata uniak keloanya, kerabat, klan, (ili, (ili,)	क्राक्रीत							0	_
a	INTENSIFIEAS PEMASARAN MICE YANG DISSELENCGARARAN OLEH SERTOS IAEN.									
	Pressuren MCE kepada komunius prefesi seperti akuntan, dokter, seziek, dl.	Diparda						0	0	
	 Failbins MCT yeng filsbulgen olds sektor løjer krecksten, kolenten den perilenen, pendiditen, kelentenen dil 	Diparda						0	0	
	Kerjasema pemeaserm MACE dengan PHM	Dipards						O	0	

2,2 CTTRA PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Pengembangan dan Pemantapan Citra Kabupaten Pesisir Barat sebagai Destinasi Pariwisata

							TELAKS	IAANA)	1					Sumb	er dana	
NO	URALAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap l					ahap I	I		APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AL DIV	Prop	Kab.	
																<u>-</u>
A	MENGEMBANGKAN DAN MEMANTAPKAN POSITIONING															
	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik: Intensifikasi implementasi Kampanye	Diparda													ŏ	
	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang berfokus pada core tourism products: Marine, Culture & Heritage	Diparda													0	
	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan	Diparda													Ö	
	Pengembangan media sosial sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan brand image daerah	Diparda													Ö	

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Citra Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing

\mathbf{I}			1				PELAKS	ANAA	1					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap		-			ahap l			APBN	APBD	APBD	Swasta
		_	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	THE DAY	Prop	Kab.	04
A 	MENINGKATKAN KEHADIRAN MEDIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN CTTRA POSTITF PARIWISATA									,					<u></u>	
	Pengembangan Pesisir Barat TOURISM CALL CENTER Diparda													Ö	Ŏ	
	 Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-tine dan off-line dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiential 	Diparda													٥	٥
	Peningkatan kualitas websites pariwisats Kabupaten Pesisir Barat	Diparda													Ö	Ŏ
	Pengembangan Pesisir Barat tourism cyber campaign, melalui: a. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dill b. Social networking machines (facebook, twitter, youtube, dll) c. Online events (contest, blogging events, dll)	Diparda						• .							Ō	8
	Pengembanganlinkage jaringan e-marketing pariwisata	Diparda													Ö	Ö
	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui online portals	Diparda									•				0	Ö
											L_{-}		<u> </u>			

2,3 KEMITRAAN PEMASALIN PAETWESATA Arab Kebijakan 1: Petingketan Pena Media Komunitasi Pemasatan Dalam Memasatan Das Mempromonikan Wisata

L						Ę	PELAKSANAAN	3	}		}		18	Stember dans		
£	URAIAN PROGRAM	PELAESANA			Taham I		┝		Tahap 0	1 di		إ	QIAV	L	ļ	į
		{	2016	2017 2	X 310	22 610	320 20	721 203	202	23 20.	2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2028	NEW	Ž.	1	4	
~	FEMASARAN, BAIK MEDIA CETAE MAUPUN MEDIA ELEFIRONIK					+-	+-	-					-		 	
	 Integrificasi promosi paket-palet visata melalmi bronu-brosus, midalah, sarat kebus, ill yang populer dibace masyaraket Labupaten Penini Bemi dalam benink advertorial 	Dipards									1			•	<u> </u>	
	Intersifikasi promosi wisita melalin program acara televisi dan Tadis, baik lokel dan nasimal	Diparts												0		
	Interafiliasi promosi peming material : Incom, kaflet dengan — tema tertentu (Revinge, Caline & Marine)	Diparda												0		
	Pendistribusian Iti Promos dalam bentuk CD, DVD kepada segrasp pelaka usaba, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memilih ketebasian pasar	Diparda												•		
R	MENGEMBANGKAN E-MAKKETING				-	-		_	<u> </u>		L					
	Pengembangan pemasama dan premos wisata Kabupaten Penari Barat melalai webake pariwisata misalaya mengeralikan desimasi-destrasa danwalk atau daya tarik wisata misan khunu yang sesasi untuk segmen wisatawan musanlara dan mancanegara	Diparda	* On the * con		the state of the second state of the second second second	- A	₹ . 4	. 1. • 2						· ·		O
L	Mergopinalizat penginasin social media marketing (Pactoock, Twitter, Youthe) schugai media konstrukasi penasatran tariak segala tegatra dan beragan jenis program prousesi wisatawan masmirra dan mencanegara	Diparda											 	0		0
	Pergernbangan Pesisir Bant tourism cyber campaign, melahti: 4. E.Magazine, E.Brochure, E.Tourism Cade, interactive tools, dill b. Social metworking machines (facebook, twitter, yourtabe, dl) c. Online events (contest, idogging events, dl)	Diparta												•		0
l	Peningkatan basikas webaisa pariwisata Kabupatan Pasist Bitrat melakui peringkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkisi e- book, e-terochure	Diparda											- -			0
	Pengenalun dan semisiasi market inseksymee untuk segmen winstawan susastana dan mencanagan (pendestan yangam cerdas melaku website seperti yang sadah disedialam oleh para provider agen perjalama)	Diparda												•		0
	Community Marketing dengan melikatan komminsa Pobbino(motor, mobil) umluk menyelenggarakan event-event kituasa (Gefhering, Audo Contest, Kontest Amal, dds)	Diparda							 					•		•
7				٦	7	\dashv	\dashv	-	-	4	4	╛	4	\dashv	┪	

Arah Lebijakan 2. Pragembangan Lemitrasu Penasaran yang Terpada, Sinergis, Bertesinambungan dan Bertesanjutan

L						PELAKSANAAN	SANA	3					Samb	Samber dana	
£	DIRAIAN PROGRAM	PELAKSANA		Tahap	p.l		Ц		Takep 🛘			NO V	APBD.	ATBO	Swede
			2016 201	2017 2018	8 2015	2019 2020 2021	202		2023	2022 2023 2024 2025	2025	AL DIV	Prop	Keh.	
_	MENGEMBANGKAN KETARPADUAN SUERCIS PROMOSI ANTAR PEMANGKU SEPENTIANA MPARIMISATA ITABAH				 		<u> </u>	ļ							
	 Kordinan, integrasi dan ambronsasi program pernasaran dengan upaya pernagkatan etapor dan pengendangan investasi. 	Diparda												0	
	Pergustan promosi bermita (co-marteting) dengan pelaku nsaha pariwisata	Diparda												0	
	Pengendangan fasilina penjualan secara bunyang (scommerce) tepada winatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung	Diparda												0	
=						_									
	MENGEMBANGKAN STRATEGI PEMASARAN BEBASIS PADA PEMASARAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, YANG MENERANEAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT, SUMBER DAYA IDNEKINGAN DAN WISATAWAN			-											
	Frigerabengan Norma, Stundar, Prosedur dan Kriteria (NST) serta implementasi Penasaran pariwisata yang bertanggangjawab	Dipards												0	
	Pergembangan korten baltan promosi periwisata yang menempatkan manyarakat lokal sebagai tuan yamah (host)-dan penerima manfast.	Dipards												0	
L_	Peninghatan penggunaan media promosi pariwasan yang ranah lingkungan. (paperlesa and recyclable material)	Diparda												0	
	Pergembengan misi pendidikan melahi berbagai bertuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan sehruh penanggu kependugan (stakeliolders), seperti pengembangan parduan doss and dosta, interpretation ici, dan filmitalan reaponsable korriem behavior	Diparda	egeneral element en en mentale de la companya de l Companya de la companya de la compa		and the second						1 mg			0	
	Pengembangan pola-pola inacutif dan penghargaan (reward) untuk mpaya penasaran yang bertangganggawah tepada pelaku utaha periwisan	Dipende												0	
	Pergembangan pola-pola samksi (punishment) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang berlanggungjawah.	Diperda	·											0	
				$\frac{1}{2}$	$\left\{ \right.$	\d	$\frac{1}{2}$	4	1						

2,4 PROMOSI PARIWISATA Arah Lebijakan 1: Pengadan dan perhassan etnistensi promosi pariwisata

١								Į	ļ	ł	١	ľ		l
					Ę	FLAKSANAAN	3					Summer	SHIPDET CRIM	
£	C MANAN PROGRAM	PELAKSANA	ß	-		L		Taken		П	_	AFBO	ATTEC	į
			2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021	2018 24	02 610	20 20	11 202	202	2024	2025	5	Prop	1	4
5	A MENCUATRAN FUNGSI DAN PERAN PROMOSI PAERVISATA				L	H								
	Mengoptimalian penggaratan social media marketing (Facebook, Twitter,												4	<
	Youtabe) schagai media komunikan pemasaran antak aegala aegacan dara	Diperda											2)
	beragan jens program promosa wisatawan													Ì
	Promoni pariwisata melalni media cetak, elektronik, dan internet	Diparda									_		0	0
	Peningkatan kerjasama kintas sektor terbait promon pariwisata	Diparda											0	Q
	Pemberian fasilias/ruang display begi pera penguseha kecil di bidang parawisata untuk menamerlam produknya dan cendera mata khas daerah	Diperde											0	0
					H	Н	Н	Ц			-	1		

3 INDUSTRI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata

							PELAKS	ANAA	1					Sumb	er dans	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap					Falusp I			APBN	APBD	APBD	Swasta
	<u> </u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ALLA	Prop	Kab.	
A	MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA PARIWISATA		Ε-			$ar{}$	F		\vdash	_						
	Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata	Diparda													0_	
	Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari level nasional ke internasional	Diparda													ō	
	Peningkatan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing	Diparda													Ō	
	Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan	Diparda													0	
В	MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF														<u></u>	
	Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisats yang meliputi multi-aktivitas dan multi- produk (contoh: perhotelan)	Diparda													٥	
	Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap	Diparda													٥	
											1	1			T -	

Arah Kebijakan 2: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

_			\Box				PELAKS	ANA	Y		_			Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA	\vdash		Tahap	I			1	ahap l	<u> </u>		APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AFDN	Prop	Kab.	5
						<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		├ ──-
<u> </u>	MEMFASILITASI PEMBENTUKAN ORGANISASI INDUSTRI PARIWISATA								!		 	↓	!		 	├
	Memfasilitasi terbentuknya Cabungan Industri Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata	Diparda													٥	
В	MEMPERKUAT MATA RANTAI PENCIPTAAN NILAI															L
	 Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama 	Diparda													ō	
	Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis	Diparda												<u> </u>	Ö	
	Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal	Diparda													0	
	Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata	Diparda													0	_
	 Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata 	Diparda												<u> </u>	0	

Arah Kebijakan S: Pengustan Kemitram Usaba Pariwisata

1			L			PEA	PELAKSANAAN	3	l	l			Amms	Sumber dans	
Š	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA		iat.	I detail				Tahap II			7	OSLIV	OBLAY	Currents
			2016	2017 2018 2019 2020 2021	118 201	202	202 0		2022 2023 2024 2025	77.07	2025	Aren	Prop	Keb.	
l				ŀ	-	Ļ	Ļ	L	L						
V	MENGEMBANGAKAN POLA-POIA KERJASAMA INDUSTRI LINTAS SEKTOR ANTARA PEMERENTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT														
	 Perggunaan sember daya lekal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaba periwisata 	Dipenda	ŀ											0	
A	MENCUAITAN DAPLEMENTASI KERJASAMA DAN MONTTORING SEKTA EVALUASI KERJA SAMA ANTAKA PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT														
	Pergembangan forum kordanssi implementasi program kerjasama antara pemerintah daerah dan dania usaha dalam pengembangan dan pemesaran destinasi-destinasi pariwisas	Dipenda												٥	
	 Progembangan forum kardinasi dan sinkroniasi pelakanaan program kerjasama dalam memingkatkan sadar wisata melahii sapta pesona 	Dipende												0	
	 Pengembangan akeras das pelaisanaan monitoring dan evaluasi program misera penaerintah daerak dan dania usaha dalam pengembangan dan penasaran destinasi-destinasi parjwisata 	Diperde											_	0	
	 Pengembangan skerns das pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kentitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap nasyarakat 	Dipenda		. 3										0	
ľ		,	ſ	{ !		Į	ļ		ŀ			1			

Arah Kebijakan 4: Pengembangan Manajemen Usaha Parwusta Yang Mengaca Pada Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjatan dan Berwawasan Lingkungan

L,			L			E	PELAKSANAAN	NYY)					TS.	Sumber dana		
ò	URALAN PROGRAM	PELAKSANA		I	Tahan I		┝		E	Taham II			T APBD	OBJAT C		-
			2016	1100	2017 2018 2019 2020 2021	610	020	021 2	022 2	202 2023 2014 2025	24 20	25 Arm	Prop	-	_	
			l		r	r	H	┝	H	┝	L	L	_			
٧	A MENDORONG TUMBURNYA DIDUSTRI YANG RAMAH LINGKUNGAN DI KORIDOR-KORIDOR PARIWISATA DAERAH			-		_										
	 Fengembangan den pedramm dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAI) metak maha-nasha periwisan 	Dipenda												•	······································	
	 Pengembangan pedentan pelestarian sumber daya alam dan badaya matak usaha-usaha periwisata 	Dipenda												0	,	
F	MENCEMBANGKAN MANAJEMEN USAHA PARIWISATA YANG PEDULI TERHADAP PELESTARIAN LINCKUNCAN DAN BUDAYA															
	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendahang pengembangan destinasi wisata dan masyarahat	Dipenda										_		0		
	 Fengembangan manajenca usaha pariwisata yang pedili terhadap pelestarian badaya setempat 	Dipenda												0		
	 Pengembangan akena dan pelakamaan menjucing dan evaluasi program antara pemerantah daerah dan dania usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi destinasi periwisata 	Dipenda												0		
						ŀ	-	_	_	Í	_			_		l

4 KELEMBAGAAN KEPARI WISATAAN

4,1 ORGANISASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataan

			\		_	I	PELAKS	ANAA	Ĭ					Sumb	er dana	
NO	URALAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap l				7	ahap l	I		APBN	APBD	APBD	Swada
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	VLD14	Prop	Kab.	3,4232
FA														_	-	
	MEREPOSISI URUSAN PARIWISATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH		l	1	ľ		1									
	Peninjauan kezabali SOT Dinas Fariwisata terhadap perkembangan pariwisata daerah, nasional dan internasional	Diperda													Ö	
	Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata	Diparda													0	

Arah Kebijakan 2: Optimalisasi Koordinasi Anter Dinas

				•		1	ELAKS.	ANAA]	V					Sumb	er dana	
NO	Uralan program	PELAKSANA			Tahap I				7	ahap l	I		APBN	APBD	APBD	Swada
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2024	2025	ALDIN	Prop	Kab.	
							Γ									
A	MERENCANAKAN PAKTISIPATIF KOORDINASI LINTAS SEKTOR			L	1 !				L _							
	Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor	Diparda										:			Ō	
	Mengintensiffkan komunikasi antar dinas	Diparda	radio di Ro												Ö	
	Monitoring dan evaluasi performance unit kerja koordinasi lintas sektor	Diparda												-	Ö	

Arah Kebijakan 3: Optimalisasi Organisasi Keperiwisataan Swasta dan Masyarakat

			ł –				PELAK	ANAA	7					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	[1	[ahap	1		APBN	APBD	APBD	Swasta
<u> </u>			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AFDN	Prop	Kab.	J#2
							\Box									
_^	memperkuat peran sekta swasta dalam meningkatkan akselerasi Pembangunan kepariwisataan melalui public-private paktnership (PPP)				_											
	Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat Kabupaten Pesisir Barat	Diparde													Ō	
	Pembentukan dan operesionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Diparda													Ō	
В	MENGEMBANGKAN DAN REVITALISASI ORGANISASI MASYARAKAT DI BIDANG PARIWISATA															
	Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat	Diparda													O_	L
	 Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata 	Diparda													0	
																L

Arah Rebijakan 4: Optimalisasi Remitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyaraksi

			, 			1	PEI AKS	ANAAN	1					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	ſ			1	ahap l	1		APBN	APBO	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AFDI	Prop	Kab.	50000
	MEMPERKUAT SINKRONISASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN		├	_	_											
	MASYARAKAT		<u> </u>													
	Percucanaan partisipatif usaha pariwisata melahii skema kemitraan	Diparda													L Ö	
	Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata	Diparda													Ö	
В	MEMPERBAIKI PELAYANAN PEMERINTAH KEPADA SWASTA DAN MASYARAKAT	<u> </u>														
	Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan	Diparda											_		Ö	
	Deregulazi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkah dengan kepariwisataan	Dipurda													O	
	Pernantaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Diparda													Ö	

4,2 SDM PARIWISATA
Arah Kebijakan 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah

\Box			T				PELALS	ANAA	1					Sumb	er dans	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap l					[ahap l	<u> </u>		APBN	APBID	APED	Swasta
L_			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Arbiv	Prop	Kub.	3#46
A	OPTIMALISASI KAPASITAS SDM			<u> </u>												
	Program technical assistance (outsourcing SDM)	Diparda		-	10										Ö	
	Program magang (training program)	Diparde													Ö	
	 Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money) 	Diparda													O	
В	MEMPETAKAN KUALIFIKASI KOMPETENSI SDM															
	Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)	Diparda	1.7			\$ 40 ET					\$ 1.00 m	er Selection			Ö	

Arah Kebijakan 2: Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisataan

			T			- 1	ELAKS	ANAA	N		-		_	Samb	cr dens	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap					[ahap]	<u> </u>		APBN	APBU	APEO	Swasta
Ц.	<u></u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AFBN	Prop	Kab.	352.4
<u> </u>					<u> </u>											
	MENGEMBANGKAN INSTITUSI PENDIDIKAN PARI WISATA	<u> </u>	<u> </u>	l	<u>. </u>		<u> </u>		<u> </u>							
L	 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah 	Diperde den Pendidikan											Ö		Ö	
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional	Diparda dan Pendidikan											Ö		0	
	MENGEMBANGKAN KERJASAMA ANTARA INSTITUSI PENDIDIKAN DAN INDUSTRI PARTWISATA															
	Kolaborusi pemerintuh dan industri puriwisata dalam penyaluran lulusan.	Diparde den Pendidikan											Ö		0	

Arah Kebijakan 3: Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

							PELAKS	ANAA!	4					Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap i	<u> </u>			•	ahap i	<u> </u>		APBN	APBD	APBD	Swasta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2 023	2024	2025	AL DI	Prop	Kah.	
	PERANCANGAN JANGKA PANJANG KEBUTUHAN SDM INDUSTRI PARIWISATA															
'	 Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan 	Diparda dan Pendidikan											Ö		Ö	
	PEMETAAN DAN PENGADAAN SDM INDUSTRI DI TIAP-TIAP KAWASAN WISATA		}													
	Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan	Diparda dan Pendidikan											Ŏ		Ö	
	Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata	Diparda dan Pendidikan		dan gad	ರೆ.ಚಿ.ಪ್ರವ ಷ ್ಕಾನಕ	us en destrai	wa in eins						Ö		Ö	
	 Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata 	Diparda dan Pendidikan											Ö		Ö	
						•					_					Ĺ

4,3 FINYILENCGARAAN PINELITAN DAN PENGEMBANGAN Arah Kebijakan 1: Peningkatan Penditian dan Pengembangan Deniman Pariwisala

						PELAESANAAN	NAAN				Ц	Some	Sumber dens	
Ş	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA	2018 20	Taken 17	2017 2018 2020	2020	2021/2	Tal 2022 2	Talkap II 2021 2022 2024	24 2025	VE VE	A PE	19	Swasta
				3	3							· -		
٧	MENINGEATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAYA TARIF WISATA													
	Fragembenges penelitian tentang perindisan pengendangan daya turik wissia dalam rangka mendarong pertumbahan desimasi periwisata dan pengenbangan daerah	Diparda											٥	
	Fragendsangan penelitian tentang pembanganan daya tarik wisata untuk meningbatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	Diparda											0	l
	Fugersburgen penelitius tentang pemantapan daya berik wisata untuk meningbuftan daya saing produk dalam menarik kenjangan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih has	Dipenda											0	
	 Frigenbungen perekhtian tentang revitalisani daya larik wisata dalam upaya peringkatan tuaktan, keberlanjatan dan daya saing produk dan destinasi puriwisata 	Dipenda											0	
B	AAENDNGKATKAN FENELITIAN DALAM RANGKA FENGEABANGAN AKSESBELIYAS DAN/ATAU TRANSPOETASI KEPAIWISATAAN		'											
	 Pengenthengan prachitian tentang perahangunan sarana transportani angkutan jalan, ANIP, dan angkutan last 	Diparda											0	
	Programmen penelhian tentang pendangunan pensama transporten angkutan jalan, sungsi, danan, dan penyeberangan, sagkutan lad	Diparda								_			٥	
	 Progembengan penclitian kentang pembanganan sistem transportasi angkutan jalan, asdp, den angkutan kut 	Diparda											0	
Ú	AMENINGKAITKAN FENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM DAN FASILITAS PABTWISATA								l					
	Programman pencifitan tertang pembangunan prasarusa waman, facilitas tenum, dan facilitas periwisata dalam menduknang perintisan pengembangan destitusi perrwisata	Diparda											0	
	 Pengembangan pencitikat kentang peningkatan prasarana umam, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwizata yang mendorong pertumbulan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinan periwisata 	Diparda				19 11 13 13 13 14							0	
	 Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana mmun, penbangunan fasilitas umum, dan fasilitas periwisala bagi destinasi-destinasi periwisata yang andah melampani ambang batas daya dulung 	Diparda											0	
Q	MENINGKATRAN PINELITIAN DALAM RANGKA PENGDABANGAN PRASARANA UMBA DAN FASULTAS PARIWISATA				_									
	 Pengendangan penelitian tentang pengerubangan yoloni, kapasitas dan partisipasi masyarakat melahii pembangunan kepariwisataan 	Diparda											٥	
	 Pungembangan penelitian tentang peningkatan potena dan kapasitas sumber daya kokal melalni pengembangan nanka produktif di bidang pariwisata 	Diparda											0	
	 Pengendangan penelitian tentang pengendangan regulan dan insentif antak menderong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menarut peraturan perundang-undangan 	Diparda											•	
П	Pengembangan penchinan tentang penguatan kemimaan rantai misa antar usaba di bidang kepariwiadaan	Dipende							H			-	0	
_	Pengendungan penchinan tentang perfuasan akses pasar terhadap produk dan ikm di bidang pariwisah dan usaha periwisah shala susku	Dipards											ه ا	
-	 Fengendengan penelitian tenting peningbatan akus dan dalungan pennodalan dalam upaya mengendungkan ikm di bidang pariwisata dan usaha pariwisata stala (BAEDA) 	Diparda											0	
	 Pengembangan pencitikan tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentangan terkait dalam merwujudkan serta pesona untuk menciptaban Mim kondusif kepariwisatsan setempat 	Diparda											0	
ш	MENDAGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA FENEEABANGAN DAN FENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG Pariwisata													
	 Pengernbangan penelitian kritang insentif invertani di bidang pariwisata sesusi dengan peraturan perundang- undangan. 	Diparda											•	
	 Pengembangan penelitian tentang tempadahan investari di bidang pariwisata 	Dipanda											ဝ	
	🚗 Pengembangan penelihian tentang promoni inrectani di bidang pariwisata	Diparda								-	_	_	0	

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

							PELAKS	ANAAI	4		_			Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	<u> </u>				iahap i	1		APBN	APBD	APBD	Swasta
	<u> </u>	_	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ALDIN	Prop	Kab.	J# 2314
		_														
A	MENINGKATKAN PENELITIAN PASAK WISATAWAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PASAR BARU DAN PENGEMBANGAN PRODUK															
	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (mass market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (niche market) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata	Diparda													0	
В	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN CITRA PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT															
	Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Pesisir Barat secara berkelanjutan	Diparda	3 x 1-0 -4	e modeli.	2. .	\$ 1.1 % %.	ş. 5 4. Îsa 2								Ö	
	Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Diparda													Ö	
	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, asdp, dan angkutan laut	Diparda	-												Ö	
	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT															
	 Pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata daerah 	Diparda	·												0	
	Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Diparda													Ö	
\neg						1								\Box		

Arah kebijakan 3: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Industri Pariwisata

			1				PELAKS	ANAAI	V	_				Sumb	er dana	
NO	URAIAN PROGRAM	PELAKSANA			Tahap	I			•	lahap l	I -		APBN	APBO	APBD	Swasta
l			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Al DIA	Prop	Kab.	3# 4 312
_					—											
A	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGUATAN INDUSTRI PARIWISATA					_							-			
	 Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata 	Diparda			٠.										Ŏ	
В	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK WISATA	-														
	Pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata	Diparda													Ö	
	Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata	Diparda	. 15 G . 17 F 2					-							Ö	
	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Diparda							l				_	<u> </u>	Ö	
С	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA	_														
	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Diparda				•									Ö	
D	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENCIPTAAN KREDIBILITAS BISNIS															
	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Diparda													Ö	
E	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANNGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN															
	Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Diparda													Ö	
			}			}	-					1		<u> </u>		

Arah kebijakan 4: Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata

		<u>=</u>					PELAKS	ANAA	1					Sumb	er dana	
NO	Uraian program	PELAKSANA			Tahap .	11			•	ahap .	1		APBN	APBD	APBD	Swarta
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AFDIA	Prop	Kab.	
A	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN															
	 Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah 	Timondo													ō	
	Pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah	Diparda													Ŏ	
	Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata	Diparda													Ö	
	 Pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata 	Diparda	Jan. 1		اللاستمالة										Ö	
В	MENINGKATKAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA					_										
	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Femerintah Daerah	Diparda													Ö	
	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Diparda						_		·					Ö	
	Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Diparda						_				\Box			Ö	
												Γ				

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN PESISIR BARAT

I. UMUM

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional.Sumbersumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dandaya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha danlapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan dibidang kepariwistaan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkukuh jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

(Cukup Jelas)

Pasal 2

(Cukup Jelas)

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

(Cukup Jelas)

Ayat (2)

. Huruf b

Yang dimaksud dengan Ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan.

```
Pasal 4
  (Cukup Jelas)
Pasal 5
   (Cukup Jelas)
Pasal 6
   (Cukup Jelas)
Pasal 7
   (Cukup Jelas)
Pasal 8
Ayat (1)
   (Cukup Jelas)
Ayat (2)
   Yang dimaksud dengan tata nilai kehidupan dan budaya daerah adalah
   segala nilai-nilai/norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan
   digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan,
   termasuk disini adalah agama dan tradisi.
Ayat (3)
   (Cukup Jelas)
Ayat (4)
   (Cukup Jelas)
Ayat (5)
   (Cukup Jelas)
Pasal 9
Ayat (1)
   (Cukup Jelas)
 Ayat (2)
   (Cukup Jelas)
 Ayat (3)
   (Cukup Jelas)
 Ayat (4)
   (Cukup Jelas)
 Ayat (5)
   Pariwisata budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
   wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-
   usaha yang terkait dibidang tersebut yang memanfaatkan dan
   mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, aset budaya
   masyarakat asli Kabupaten Pesisir Barat baik tata nilai, adat istiadat,
   maupun produk budaya fisik sebagai objek dan daya tarik wisata.
   Jenis pariwisata yang lain atau konvensi adalah segala sesuatu yang
   berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik
   wisata serta usahausaha yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan
   konvensi yang dipandang mampu meningkatkan integritas bangsa dan
```

negara yang berkaitan terutama dengan aspek budaya dan aspek lain seperti ekonomi, kesehatan, kemanusiaan dan politik serta mampu

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (6)

(Cukup Jelas)

Pasal 10 (Cukup Jelas)

```
Pasal 11
Ayat (1)
  Kawasan adalah sebagian wilayah dalam arti administratif.
  (Cukup Jelas)
Ayat (3)
  (Cukup Jelas)
Pasal 12
   (Cukup Jelas)
Pasal 13
  (Cukup Jelas)
Pasal 14
   (Cukup Jelas)
Pasal 15
   (Cukup Jelas)
Pasal 16
   (Cukup Jelas)
Pasal 17
   (Cukup Jelas)
Pasal 18
   (Cukup Jelas)
Pasal 19
   (Cukup Jelas)
Pasal 20
   (Cukup Jelas)
Pasal 21
Ayat (1)
   (Cukup Jelas)
Ayat (2)
       Huruf a
       (Cukup Jelas)
       Huruf b
          Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari
          kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat
          sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang
          terdiri dari peninggalan sejarah, cagar budaya, kampung adat,
          makam raja-raja, museum dan sanggar tari/sanggar seni.
       Huruf c
          Wisata minat khusus adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari
          kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat
          sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang
          terdiri dari penelitian, kajian ilmiah, surfing, diving, seni dan
```

budaya serta ekowisata.

Ayat (3)

(Cukup Jelas)

```
Pasal 22
   (Cukup Jelas)
Pasal 23
   (Cukup Jelas)
Pasal 24
   (Cukup Jelas)
Pasal 25
   (Cukup Jelas)
Pasal 26
   (Cukup Jelas)
Pasal 27
   (Cukup Jelas)
Pasal 28
   (Cukup Jelas)
Pasal 29
   (Cukup Jelas)
Pasal 30
   (Cukup Jelas)
Pasal 31
   (Cukup Jelas)
Pasal 32
   (Cukup Jelas)
Pasal 33
   (Cukup Jelas)
Pasal 34
 Ayat (1)
   (Cukup Jelas)
 Ayat (2)
        Huruf a
           (Cukup Jelas)
        Huruf b
           Iklim yang kondusif adalah sesuatu keadaan atau suasana yang
           dapat menunjang tercapainya tujuan pengembangan pariwisata
           antara lain dengan mewujudkan sapta pesona yaitu aman, tertib,
           bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.
 Pasal 35
    (Cukup Jelas)
 Pasal 36
    (Cukup Jelas)
```

Pangsa pasar adalah perkiraan perhitungan yang didasarkan pada hukum permintaan dibidang kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan jumlah arus pariwisata, baik pariwisata nusantara maupun mancanegara.

Pasal 38

Ayat (1)

Teknologi komunikasi dan informasi yang moderen meliputi penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jasa pelayanan komunikasi dan informasi melalui surat elektronik (email) maupun internet.

Ayat (2)

(Cukup Jelas)

Ayat (3)

(Cukup Jelas)

Pasal 39

(Cukup Jelas)

Pasal 40

(Cukup Jelas)

Pasal 41

(Cukup Jelas)

Pasal 42

(Cukup Jelas)

Pasal 43

(Cukup Jelas)

Pasal 44

(Cukup Jelas)

Pasal 45

(Cukup Jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR .27

5